

Mahfud MD Bersyukur Perayaan Natal Tahun ini Berjalan Aman dan Damai

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa gelaran Perayaan Natal Tahun 2021 di Indonesia berjalan lancar dan damai. Atas hal itu dia pun mengucapkan syukur.

Mahfud menuturkan, damai dan lancarnya perayaan natal tahun ini tak terlepas dari masyarakat menampilkan watak asli mereka.

"Alhamdulillah peringatan Hari Natal Tahun 2021 ini berjalan lancar dan damai. Itulah sejatinya watak asli Indonesia," kata Mahfud melalui akun Twitter pribadinya, Senin (27/12).

Mahfud mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap bersinergi menyambut Tahun Baru 2022. Dia berharap, kedisiplinan dan taat terhadap protokol kesehatan bisa tetap ditetapkan.

"Mari terus bersinergi agar dalam menyambut tahun baru 2022 kita tetap melakukannya dengan tertib dan tetap taat prokes, tetap waspada pada Covid-19," katanya.

Sekadar informasi, dalam upaya memastikan perayaan Natal berjalan lancar dan aman, Mahfud berkunjung ke 4 gereja yang ada di wilayah DKI Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Gereja Katedral Jakarta dan Gereja GPIB Immanuel Jakarta dikunjungi pada Jumat (24/12).

Ketika itu dia didampingi oleh Dankor Brimob Polri Irjen Pol Anang Revandoko. Keesokan harinya, Mahfud berkunjung ke dua gereja lain di Surabaya, Jawa Timur, yakni Gereja Kristen Indonesia dan Gereja Katedral Hati Kudus Yesus. ● **mei**

Hasil Survei Elektabilitas Sandiaga Tertinggi di Bursa Calon Wakil Presiden

JAKARTA (IM) - Survei yang digelar Politika Research & Consulting (PRC) bersama Parameter Politik Indonesia (PPI) mengungkapkan bahwa nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon wakil presiden.

"Nyaris di semua survei kita, setidaknya dalam 2 tahun ini PRC melakukan survei nasional, Sandi selalu unggul ketika ditanyakan sebagai calon wakil presiden," kata Direktur Eksekutif PRC Rio Prayogo, Senin (27/12).

Berdasarkan survei tersebut, terdapat 16,7 persen responden yang menyatakan akan memilih Sandiaga sebagai calon wakil presiden jika pemilihan presiden diadakan saat survei dilaksanakan. Elektabilitas Sandiaga itu mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (12,4 persen) maupun dua pasangannya ketika berlaga di Pilpres 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 yakni Prabowo Subianto (10,5 persen), dan Anies Baswedan (9,3 persen).

Menurut Rio, sosok Sandi di mata masyarakat me-

mang identik dengan jabatan orang nomor dua, seperti ketika Sandi maju sebagai calon wakil presiden pada 2019 dan menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

"Mungkin memori masyarakat masih terkenang di Pilpres 2019 dan beberapa hal lainnya misalnya wakil gubernur DKI, identik sekali Sandi dengan wakil-wakil," kata Rio.

Di samping itu, Sandi juga memiliki elektabilitas tertinggi ketika responden ditanyai soal sosok yang paling mewakili kelompok milenial untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Dalam simulasi itu, Sandiaga memperoleh elektabilitas sebesar 21,6 persen, mengungguli Ganjar (15,3 persen) dan Prabowo (13,8 persen).

Adapun survei ini digelar pada 12 November 2021-4 Desember 2021 dengan metode wawancara tatap muka kepada 1.600 orang responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar 2,5 persen. ● **mei**

KPK Periksa Pegawai Adhi Karya Terkait Proyek Gedung IPDN

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pegawai PT Adhi Karya, Didi Kustiadi, Senin (27/12). Ia diperiksa terkait dugaan korupsi pembangunan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Minahasa, Sulawesi Utara pada 2011.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DP (Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Persero Dono Purwoko)," ujar Plt juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin 27/12/2021.

Selain memeriksa Didi, KPK juga bakal memeriksa mantan pegawai PT Adhi Karya Ari Prijo Widagdo, dan Direktur PT Kharisma Indotarium Utama Mulyawan. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Dono Purwoko (DP) sebagai tersangka.

Selain Dono, KPK juga telah menetapkan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Dudy Jocom dan irektur Operasi PT Waskita Karya (Persero) Adi Wibowo, sebagai tersangka pada kasus tersebut.

Meski sudah berstatus tersangka, KPK belum menahan Adi karena yang bersangkutan ber alasan sakit. KPK pun bakal melakukan pemanggilan ulang untuk Adi.

Kasus ini berawal ketika Dudy menghubungi beberapa kontraktor untuk menginformasikan bahwa akan ada lelang proyek pembangunan kampus IPDN di Sulawesi, pada 2011.

Sebelum lelang dilakukan, diduga telah disepakati adanya pembagian kerja untuk PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya.

Waskita Karya mendapat proyek di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Sedangkan Adhi Karya menggarap proyek di Sulawesi Utara. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp11,18 miliar di proyek pembangunan gedung IPDN Sulawesi Selatan dan Rp9,378 miliar di proyek Sulawesi Utara. ● **han**

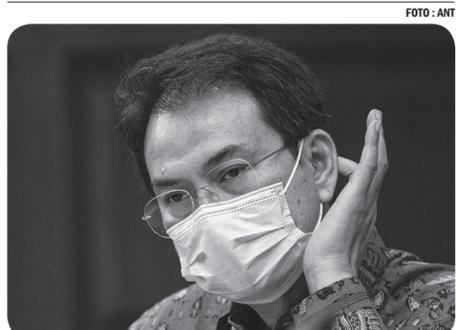


FOTO: ANT

SIDANG LANJUTAN AZIS SYAMSUDDIN

Terdakwa Azis Syamsuddin menjalani sidang lanjutan kasus suap kepada mantan penyidik KPK AKP Stephanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/12). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan tiga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

2 Polhukam

FOTO: ANT



MENTERI SOSIAL TINJAU PENYALURAN BANTUAN DI SURABAYA

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kanan) meninjau penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Surabaya, Jawa Timur, Senin (27/12). Mensos memantau secara langsung pembagian bantuan itu kepada penerima manfaat.

Jaksa Hadirkan Tiga Orang Saksi Diprotes Kubu Azis Syamsuddin

Tim penasihat hukum Azis berpendapat, ketiga saksi yang dihadirkan KPK tidak mengetahui terkait kasus pengurusan perkara terhadap mantan penyidik KPK, Stephanus Robin Pattuju.

JAKARTA (IM) - Tim penasihat hukum terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, memprotes tiga saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke sidang lanjutan kasus dugaan suap pengurusan perkara, Senin (27/12).

Kubu Azis menilai ketiga saksi dari jaksa KPK tidak relevan dengan perkara. Ketiga saksi tersebut adalah Taufik Rahman (mantan Kadis Bina Marga Lampung Tengah), Aan Riyanto (Kasubbid Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah), dan Darius Hartawan (Direktur CV Teyatan Konsultan).

Kubu Azis Syamsuddin menilai ketiga saksi tersebut tidak mengetahui terkait kasus pengurusan perkara terhadap

mantan penyidik KPK, Stephanus Robin Pattuju.

"Terkait saksi yang dihadirkan hari ini bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui. Setelah kami membaca berita acara pemeriksaan, ada satu dugaan pemberian suap kepada saudara Robin," protes salah satu tim penasihat hukum Azis Syamsuddin di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (27/12).

Tim penasihat hukum Azis berpendapat, ketiga saksi yang dihadirkan tim jaksa KPK merupakan pihak-pihak yang kerap memberikan keterangannya terkait kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Lampung Tengah. Karena itu, kubu Azis menganggap keterangan para saksi melenceng dari surat dakwaan.

"Kalau memang kemudian ada dugaan tindak pidana korupsi yang diketahui bahwa saudara terdakwa ini adalah diduga kuat melakukan suatu perbuatan pidana terhadap perkara penyelidikan, otomatis perkaranya tidak dalam status lidik, tapi sidik," ucap salah satu tim penasihat hukum Azis.

Tim jaksa KPK menekankan, keterangan tiga saksi yang dihadirkan pada sidang hari ini masih berkaitan dengan perkara Azis Syamsuddin. Sebab, Azis diduga menyuap mantan penyidik KPK, Stephanus Robin Pattuju, sebagai upaya untuk menghilangkan namanya dalam perkara suap pengadaan DAK Lampung Tengah.

"Dalam surat dakwaan sudah jelas disampaikan bahwa pemberian tersebut terkait dengan pengurusan DAK Lampung Tengah," ujar jaksa.

Azis Syamsuddin telah didakwa menyuap mantan penyidik KPK, Stephanus Robin Pattuju sebesar Rp3.099.887.000 dan 36.000 dolar AS atau setara Rp519.706.800. Jaka

diakumulasikan, total suap Azis ke Stephanus Robin sekitar Rp3.619.594.800 (Rp3,6 miliar).

Azis didakwa sengaja menyuap Stephanus Robin melalui rekannya seorang pengacara, Maskur Husain dengan tujuan agar membantu mengurus kasus di Lampung Tengah. Di mana, kasus itu melibatkan Azis Syamsuddin dan orang kepercayaan, Aliza Gunado.

Dalam dakwaan, disebutkan sejak 8 Oktober 2019 KPK menyelidiki dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017. KPK kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.

Lidik-45/ 01/ 02/ 2020 tanggal 17 Februari 2020. Di mana, dalam surat penyelidikan tersebut diduga ada keterlibatan Azis dan Aliza Gunado sebagai pihak penerima suap.

Azis dan Aliza kemudian berupaya agar namanya tidak diusut dalam penyelidikan perkara suap di Lampung Tengah tersebut. Azis berupaya meminta bantuan ke Stephanus Robin agar tidak dijadikan tersangka dengan memberikan sejumlah uang suap.

Atas perbuatannya, Azis didakwa melanggar Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. ● **han**

Kasus Korupsi Bupati Probolinggo, KPK Periksa Pemimpin Bank Jatim

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pemimpin Bidang Operasional Bank Jatim, Kristina Katrin, Senin (27/12). Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap seleksi jabatan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS).

"Hari ini (27/12) pemeriksaan saksi TPK terkait seleksi jabatan dilingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dan dugaan TPPU untuk tersangka PTS," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/12).

Selain memeriksa Kristina, tim penyidik juga bakal memeriksa CSR Bank Mandiri, Hera, sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya anggota DPR RI Hasan Aminuddin (HA) ditetapkan tersangka dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo Tahun 2021. Keduanya menjadi tersangka perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, KPK telah menetapkan dua puluh dua orang sebagai tersangka. Sebagai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima HA, PTS, DK dan MR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. **han**



FOTO: ANT

PEMERIKSAAN LANJUTAN KASUS SUAP DI MUARA ENIM

Sejumlah anggota dan mantan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (27/12). Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap 15 anggota DPRD Muara Enim dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa pada proyek di Dinas PUPR serta pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim.

Bacalon Anggota KPU-Bawaslu Jalani Tes Kesehatan di RSPAD

JAKARTA (IM) - Bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalani tes kesehatan jasmmani di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Tes kesehatan berlangsung secara bergiliran mulai 27 hingga 30 Desember 2021. Ketua Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU dan Bawaslu Juri Ardiantoro mengatakan, untuk menjadi penyelenggara Pemilu dibutuhkan stamina yang luar biasa.

Sehingga tes kesehatan tersebut dinilai penting bagi bakal calon anggota KPU dan Bawaslu. Dia berharap, bakal calon yang mengikuti tes kesehatan ini mendapatkan hasil yang diharapkan.

"Hari ini kita akan tes semua, mudah-mudahan semuanya sehat," katanya, Senin (27/12).

Direktur Pengembangan dan Riset RSPAD Sutan Finekri mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Timsel kepada RSPAD sebagai tim pemeriksa kesehatan bakal calon anggota KPU dan Bawaslu. Kepercayaan ini merupakan kebanggaan bagi pihak RSPAD, karena sebagai bentuk andil mengawal proses jalannya demokrasi di Indonesia.

"Nanti acara tes kesehatan akan diatur oleh tim panitia sendiri dari RSPAD, dan mudah-mudahan Bapak/Ibu senyaman-nyamannya (mengikuti) pemeriksaan di RSPAD," tuturnya.

Seperti diketahui, sebanyak 48 bakal calon anggota KPU dan Bawaslu berhak

mengikuti tes wawancara dan tes kesehatan. Jumlah itu terdiri dari 28 pelamar anggota KPU dan 20 pelamar anggota Bawaslu.

Sebanyak 48 bakal calon tersebut sebelumnya telah mengikuti tes psikologi lanjutan atau dinamika kelompok yang menjadi bagian dari tahapan seleksi. ● **han**

PENGUMUMAN PENURUNAN MODAL

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. RADHIA TEKNOLOGI SISTEM (Perseroan) berkedudukan di Jakarta Pusat tanggal 23 Desember 2021, telah diputuskan untuk menurunkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dari Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).

Jakarta, 28 Desember 2021

Direksi
PT. RADHIA TEKNOLOGI SISTEM

sme finance Indonesia	
LAPORAN PIUTANG HAPUS BUKU PERIODE 31 AGUSTUS 2021	
(dalam jutaan rupiah)	
Nama Debitur	Pokok Hutang
I WAYAN ADI SUSILA	31.500
Total Piutang Hapus Buku 31 Agustus 2021	31.500
Jakarta, 28 Desember 2021	
PT SME FINANCE INDONESIA DIREKSI PERSEROAN	